BAB IV

BERBAGAI UPAYA YANG DILAKUKAN *CTI-CFF* DALAM MELESTARIKAN TERUMBU KARANG DI WILAYAH SEGITIGA KARANG DUNIA *(CORAL TRIANGLE)*

Bab ini akan membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh *CTI-CFF* dalam melestarikan terumbu karang di wilayah Segitiga Karang Dunia *(Coral Triangle)*. Akan dibahas lebih rinci mengenai upaya dan hasil dari *CTI-CFF* dalam merespon kerusakan terumbu karang yang terjadi di wilayah *Coral Triangle* serta keberhasilan dari program *CTI* tersebut.

Guna memastikan keberlanjutan dari pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pesisir, diperlukan adanya tindakan dalam jangka panjang yaitu untuk saat ini dan untuk masa depan melalui kerjasama CTI-CFF. Negara anggota CTI-CFF telah mempersiapkan rencana kerja dengan tema perlindungan terumbu karang, perikanan dan ketersediaan pangan melalui *National Plan Of Action* dari masing-masing negara yang dibahas pada tingkat *Senior Official* dan dicetuskan pada *World Ocean Conference (WOC)* pada bulan Mei 2009 di Manado. Keenam negara di Segitiga Terumbu Karang secara bersama-sama menyusun *Regional Plan of Action*, yang segera dilanjutkan dengan penyusunan *National Plan of Action CTI-CFF* oleh setiap negara yang selaras dengan sasaran rencana regional tersebut. Rencana adaptasi pembangunan wilayah pesisir dan kelautan/ Rencana Aksi Regional terhadap dampak perubahan iklim global memiliki 5 sasaran utama yaitu pengelolaan bentang laut (*sea scape management*), pendekatan ekosistem

dalam pengelolaan perikanan, penerapan *resilient principles* dalam pembangunan jejaring 56 kawasan konservasi laut, mitigasi bencana, rehabilitasi pesisir dan perlindungan spesies yang terancam punah, dan status spesies ikan yang terancam punah membaik.

Kawasan *Coral Triangle* yang berada di Asia tenggara sebagai kawasan Benua Maritim memiliki sumber kekayaan laut terbesar khususnya ikan dan terumbu karang paling luas. Kawasan tersebut didominasi oleh negara berkembang merupakan negara yang mengalami pertumbuhan populasi yang sangat pesat, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Internasional. Dengan populasi penduduk yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi, maka eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya alam pesisir dan laut semakin tinggi dan tidak terkendali. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang bersifat eksploitatif dan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, akan menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian sumberdaya alam tersebut bagi generasi mendatang. Masyarakat dikawasan *Coral Triangle* ini bergantung pada hasil laut dan sumber daya kelautan lainnya sebagai sumber utama pendapatan ekonomi, makanan, mata pencaharian dan pendapatan ekspor. Keanekaragaman hewan laut seperti Tuna, ikan karang, udang dll merupakan ekspor permintaan yang tinggi bagi negara-negara besar seperti Jepang, Amerika Serikat, Eropa, dan China.

Faktor ancaman yang terjadi disebabkan adanya tekanan pada sumber daya laut dan pesisir seperti penangkapan hasil laut yang tak terbatas, teknik

penangkapan ikan yang merusak, polusi dari daratan, konservasi habitat di pesisir serta perubahan iklim. Dampak dari naiknya suhu air laut mengakibatkan kematian terumbu karang secara luas, sehingga menimbulkan reaksi pemutihan karang yaitu hilangnya mikroalga simbionnya yang menyebabkan kematian karang. Selain itu pertambahan *CO2* mengakibatkan air laut mengalami pengasaman. Pengasaman tersebut akan menghambat pertumbuhan karang sehingga merusak struktur fisik karang ,sehingga status sumber daya perairan dan pesisir saat ini dan masa depan di kawasan *Coral Triangle* sangat memprihatinkan.

CTI-CFF sebagai organisasi yang bergerak di bidang konservasi keanekaragaman hayati laut dan pesisir berupaya untuk melestarikan terumbu karang di kawasan Segitiga Karang Dunia. Hal ini dilakukan karena banyaknya ditemukan kerusakan di kawasan Segitiga Karang Dunia.

Berbagai macam upaya dilakukan oleh *CTI-CFF* dalam merespon kerusakan terumbu karang di kawasan Segitiga Karang Dunia, diantaranya:

A. Melakukan Konservasi Keragaman Hayati

Untuk melancarkan pelaksanaan program konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir tentunya membutuhkan dana, oleh karena itu *Coral Triangle Initiative* menarik investor dari berbagai macam donator, organisasi lingkungan, dan berbagai negara. Sebagai donator pelaksana *Global Environment Facility Funding* bersama ADB memberikan dana sebesar 72 juta US dollar untuk 5 tahun tahap awal pelaksanaan program dan pinjaman sebesar 300 juta US Dollar. Selain

itu, beberapa negara *partnership* seperti AS dan Australia juga turut memberikan dana sebesar 40 juta US Dollar untuk mendukung program tersebut dan memberikan fasilitas forum lokakarya.

Negara- negara *Coral Triangle* mendeklarasikan *CTI Leaders Declaration* pada pelaksanaan *CTI-CFF Summit* tahun 2009 di Bali yang berisi kesepakatan untuk mengadopsi *CTI-RPOA* kedalam undang-undang tiap negara anggota yang menyatakan bahwa *CTI-RPOA* merupakan dokumen yang dapat diperbaharui dan tidak mengikat secara hukum untuk mengkoservasi dan mengelola secara berkelanjutan sumber daya pesisir dan laut di kawasan *Coral Triangle* dengan pertimbangan berdasarkan peraturan dan kebijakan masing-masing negara anggota.[1]

Pada Mei 2014, *CTI-CFF* meluncurkan kerangka kerja sama rencana aksi *Coral Traingle Marine Protected Areas Sistem (CTMPAS)* seiiring beredarnya isu eksploitasi sumber daya alam di wilayah perairan laut dan pesisir yang sudah mendekati titik kritis di kawasan Segitiga Terumbu Karang, diharapkan masyarakat *memperoleh manfaat paling besar dari diluncurkannya kerangka kerja dan rencana aksi CTMPAS.*[2] Pengelolaan kawasan konservasi perairan tidak terlepas dari pengelolaan sumberdaya ikan secara keseluruhan. Konservasi

---

[1] "Coral Triangle Initiative", diakses dari http://coraltriangleinitiative.org/ pada 28 Mei 2017 pukul 18.59 WIB

[2] http://kkji.kp3k.kkp.go.id. 2014. CTI-CFF Dorong Pengelolaan dan Perlindungan Kawasan Perairan dan Pesisir Secara Berkelanjutan. Diakses melalui http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/beritabaru/205-cti-cff-dorong-pengelolaan-dan-perlindungan-kawasan-perairan-dan-pesisir-secara-berkelanjutan pada tanggal 29 Mei 2017 pukul 21.49 WIB

sumberdaya ikan adalah upaya melindungi melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Sebagai upaya konservasi wilayah perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah melakukan kebijakan antara lain, yaitu pencanangan 10 juta ha 2010 Kawasan Konservasi Laut dan 20 juta hektar pada tahun 2020.

Adapun pengembangan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya yaitu melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik tersebut, menetapkan strategi pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya dengan melakukan pengelolaan dan pengembangan konservasi sumberdaya alam dan lingkungannya, melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik, dengan mengembangkan kebijakan, penyusunan/pengembangan pedoman, pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan, pengembangan pilot project, bimbingan teknis fasilitasi serta mengembangkan kerjasama nasional dan internasional di bidang konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya.

Selain itu, upaya yang dilakukan untuk pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang efektif adalah dengan mengembangkan Kawasan Konservasi Perairan (KKP), yaitu mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan laut sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting untuk memijah dan berkembang biak dengan baik. Dengan mengalokasikan sebagian wilayah pesisir

dan laut yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, ekosistem terumbu karang yang sehat, dan menyediakan tempat perlindungan bagi sumberdaya ikan, maka pada akhirnya akan mendukung kegiatan perikanan dan pariwisata berkelanjutan.

Adapun beberapa upaya konservasi yang dilakukan oleh negara-negara anggota *Coral Triangle* antara lain :

a. Indonesia

Pada tahun 2010, pemerintah Indonesia bersepakat dengan *Coral Triangle Initiative* untuk memberbudayakan perairan laut seluas 100.000 km2 dalam Kawasan Konservasi Perairan, sebelumnya pemerintah telah meresmikan beberapa Taman Nasional, diantaranya Taman Nasional Laut Sawu seluas 35.000 km2 ditahun 2009, Taman Nasional Laut Anambas seluas 12.600 km2 pada tahun 2011. Sehingga pada tahun 2011, laut Indonesia telah memiliki 139.000 km2 Kawasan Konservasi Perairan. Pada tahun 2020 rencanannya Indonesia akan memperluas kawasan hingga mencapai 200.000 km2.

Saat ini, Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia dikelolah oleh Kementrian Perikanan, Kementrian Kehutanan, pemerintah daerah dan masyarakat. Peran masyarakat diharapkan mampu mengelola Kawasan Konservasi Perairan dengan baik sebab telah di serahterimakan oleh kewenangan Kementrian Perikanan. Kawasan Konservasi Perairan dengan jumlah terumbu karang tersebesar berada di Indonesia dengan presentase 29%, tetapi dari 175 Kawasan Konservasi Perairan hanya 3 kawasan yang dinilai telah sepenuhnya

efektif dalam menangani tingginya tekanan penangkapan. Ketiga Kawasan Konservasi Perairan yaitu Taman Nasional Waigeo Barat, Taman Konservasi Laut Kofiau dan Kepulauan Boo, dan Taman Konservasi Laut Teluk Mayalibit, berada di Kepulauan Raja Ampat dan ketiganya melindungi kurang dari 1% kawasan terumbu karang di Indonesia. Sekitar 9% terumbu karang di Indonesia yang berada di dalam Kawasan Konservasi Perairan dinilai sebagian efektif, 14% dinilai tidak efektif, dan 5% selebihnya tanpa penilaian . Untuk meningkatkan efektivitas kawasan tersebut, *CTSP-USAID* dan Kementerian Perikanan sedang menyusun protokol untuk memperkuat pengelolaan KKP di Indonesia dan keenam negara anggota *Coral Triangle Initiative.*

b. Malaysia

Negara Malaysia merupakan salah satu negara *Coral Triangle* yang memiliki banyak Kawasan Konservasi Perairan yang luas, salah satu kawasan konservasi yang diusulkan adalah Taman Tun Mustapha dengan luas 100.000 km2 untuk dikukuhkan dilepas pantai Sabah utara sehingga memperluas kawasan konservasi yang ada di Malaysia. Pelaksanaan Kawasan Konservasi Perairan ini berada dibawah tanggungjawab beberapa lembaga daerah maupun nasional. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Perikanan tahun 1985. Saat ini terdapat 42 kawasan konservasi yang dikelola oleh Departement Taman Laut di Semenanjung Malay. Total keseluruhan Kawasan Konservasi Perairan yang dimiliki Malaysia sekitar 93 wilayah dengan luas terumbu karang 7% dan yang dianggap efektif hanya 1% dan setengah efektif sekitar 5%. 5 wilayah diantaranya dianggap

mampu menurunkan tekanan penangkapan secara berlebih, sedangkan 41 dianggap setengah efektif dan 30 dianggap tidak efektif dan 2% lainnya dianggap tidak efektif.

c. Papua Nugini

Di Papua Nugini pengelolaan dan perlindungan sumberdaya pesisir dan yang berkaitan dengan perikanan diatur oleh undang-undang nasional. Namun secara teknis, tingkat daerahlah yang memiliki banyak wewenang terhadap wilayah mereka masing-masing, khususnya menggunakan teknik penangkapan secara tradisional melalui hak ulayat laut dimana mereka berhak melarang siapapun untuk mengelola sumberdaya mereka. Dalam undang-undang dasar negara, pemerintah secara sah mengakui adanya hak ulayat walaupun dalam pelaksanaannya ditiap-tiap masyarakat daerah berbeda berdasarkan adat kebiasaan serta tingkat ekonomi sosial. Hak ulayat laut dan pesisir di Papua Nugini mencapai 90%, sehingga walaupun kebijakan pemerintah lebih tinggi tetapi pelaksanaannya bergantung pada masyarakat sekitar. Kurangnya dana dan kemampuaan menegakkan peraturan mengenai lingkungan hidup. Oleh sebab itu, peran masyarakat daerah sangat penting untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan sumberdaya laut bagi kesehatan masyarakat sekitar pesisir.

Papua Nugini telah mendirikan 96 Kawasan Konservasi Perairan untuk melestarikan sebanyak 5% terumbu karang diwilayah tersebut. data menunjukan Kawasan Konservasi mampu menurunkan tekanan kerusakan padaa terumbu karang. 3 kawasan dianggap setengah efektif, 10 tidak efektif, dan lainnya belum

teridentifikasi. Dalam kawasan konservasi luas terumbu karang, yang efektif hanya -1% sedangkan yang tidak efektif sebanyak 3%.

d. Filipina

Di Filipina, pengelolaan dan perlindungan Kawasan Konservasi Perairan kabupaten dikelola oleh pemerintah daerah yang batas garis pantainya sejauh 15km. Wewenang yang dipegang oleh pemerintah daerah tersebut mampu meningkatkan jumlah kawasan konservasi daerah tanpa melalui persetujuan pemerintah pusat. Undang-Undang Perikanan tahun 1998 telah menetapkan sasaran secara luas Kawasan konservasi Nasional untuk melestarikan 15% wilayah laut kabupaten dengan sistem larangan penangkapan serta Strategi Cagar Laut Filipina pada 2004. Diwacanakan pada tahun 2020, 10% terumbu karang berada dalam kawasan larangan tersebut. Ditahun 2010, survey menemukan kemajuan yang signifikan dimana 5% perairan kabupaten sudah berada di dalam Kawasan Konservasi Perairan dan 0,5% berada dalam wilayah larangan tangkap.

Dari survey yang dilakukan, 25 Kawasan Konservasi Perairan dinilai efektif menurunkan tekanan yang diakibatkan tangkapan berlebih, 112 kawasan dinilai sebagian efektif, dan tidak efektif sebayak 61 kawasan. Dari beberapa kawasan konservasi nasional yang dinilai efektif 2 diantaranya adalah Terumbu Karang Tubbataha dan Pulau Apo. Penegakan undang-undang dan kepatuhan sangat berpengaruh bagi manfaat kawasan konservasi tersebut bagi perikanan dan hal tersebut merupakan suatu tantangan bagi pemerintah Filipina. Tetapi, Jaringan Bantuan Kawasan Konservasi bekerja sama dengan pemerintah dan LSM yang

dibentuk untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan KKP, melakukan survei KKP pada tahun 2007 dan menemukan bahwa penegakan peraturan penangkapan di KKP telah membaik sejak survei sebelumnya pada tahun 2000.

e. Timor Leste

Taman Nasional Nino Konis Santana seluas 1.240 km2 yang diantaranya mencakup 680 km2 daratan dan 56- km2 lautan adalah taman nasional pertama di Timor Leste yang terletak di ujung pantai timur negara ini didirikan pada tahun 2007. Taman Nasional Timor Leste sedang merencanakan pengelolaan namun masih menunggu penetapan status hukum yang resmi walaupun kawasan tersebut terlah terlebih dahulu beroperasi. Pemerintah setempat menggandeng *Coral Triangle Support Partnership (CTSP)* guna meningkatkan kemampuan pengelolaan laut di Taman Nasional Timor Leste yang melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat untuk membangun zona peta yang dapat membantu masyarakat untuk melestarikan terumbu karang dan mencegah munculnya ancamaan.

f. Kepualuan Solomon

Di kepulauan Solomon, pengelolaan sumber daya pesisir dan tanggung jawab menurut undang-undang diserahkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Seperti kasus yang terjadi di Papua Nugini, Undang-Undang Perikanan tahun 1988 Kepulauan Solomon mengakui adanya hak ulayat sebesar 87% dari tanah negara dan ekosistem laut lainnya sehingga hal ini sangat mempengaruhi strategi konservasi pemerintah meskipun sebenarnya

tanggungjawab pengelolaan penangkapan ikan dilimpahkan kepada 9 provinsi pemerintahan. Namun, sejak 2003, *The Solomon Islands Locally Managed Marine Area (SILMMA) Network* atau Jaringan LMMA Kepulauan Solomon yang dikelola oleh masyarakat memberikan manfaat yang sangat besar dalam pembangunan Kawasan Konservasi Perairan dalam melestarikan sumberdaya di negara tersebut.

Untuk melancarkan pelaksanaan pengelolaan kawasan bagi masyarakat secara hukum yang sah, sehingga pada tahun 2010, dikeluarkan Undang-Undang tentang Daerah Lindung yang merupakan perkembangan pendekatan pengelolaan terpadu antar pejabat pemerintahan negara ini guna menutupi kekurangan sistem yang terjadi saat ini. Saat ini terdapat 127 Kawasan Konservasi Perairan yang telah diteliti, 18 tempat dinilai tidak mampu mengurangi ancaman, sebanyak 6% terumbu karang berada dalam wilayah tersebut dan hanya 1% yang dinilai tidak terlalu efektif.

B. Melaksanakan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Menangani Kemiskinan Melalui Pembangunan Ekonomi

Kawasan *Coral Triangle* sebagai pusat keanekaragaman hayati perikanan memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi sehingga mendorong tumbuhnya pembangunan dan tumbuhnya bisnis-bisnis berkelanjutan. Salah satunya yaitu kawasan ini menghasilkan berbagai spesies ikan hias dan menyediakan seafood bagi jutaan penduduk dunia sehingga semakin meningkatnya jumlah populasi penduduk dunia dan pertumbuhan ekonomi yang cepat serta tekanan perdagangan

dunia dalam sektor bisnis yang bergerak di kawasan ini, maka kompetisi bisnis pun makin kuat. Diperkirakan ada lebih dari 90% perdagangan ikan hias dunia berasal dari hasil tangkapan dan berkaitan dengan ekosistem terumbu karang, sementara perdagangan ikan hias dunia terdiri dari 14 hingga 30 juta ikan atau sekitar 1.800 spesies karang, 1,5 juta hidup dengan 150 spesies, dan sekitar 1.814 ton koral skeleton.

Adapun hal yang perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan sumber daya pesisir dalam usaha yang dilakukan melalui manajemen sumberdaya secara bertanggung jawab dan penanganan pemasaran yang efektif dalam jangka panjang dan memberikan keuntungan bagi kelestarian lingkungan maupun pasar global dan domestic yaitu menekankan bahwa manfaat dapat dinikmati oleh seluruh pihak dan kontribusi perikanan secara langsung menyediakan lapangan kerja dan menyediakan penghidupan bagi masyarakat dimana pengembangan budidaya terumbu dalam hal pelestarian terumbu karang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat pesisir.[3]

Rencana aksi *Coral Triangle Marine Protected Area System (CTMPAS)* yang dibentuk oleh CTI-CFF seiiring beredarnya isu eksploitasi sumber daya alam di wilayah perairan laut dan pesisir yang sudah mendekati titik kritis di kawasan Segitiga Terumbu Karang sangat diharapakan oleh negara *Coral*

[3] Industry.bisnis.com. 2014. Kemitraan di Wilayah Segitiga Karang Pacu Bisnis Berkelanjutan. Diakses melalui \http://industri.bisnis.com/read/20140515/99/228043/kemitraan-di-wilayah-segitiga-karang-pacu-bisnis-berkelanjutan pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 15.44 WIB

Triangle mampu melindungi dan melestarikan kawasan perairan sehingga dapat mengurangi ancaman termasuk memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat yang bergantung pada kekayaan sumberdaya alam di kawasan tersebut secara berkelanjutan sehingga mampu mensejahterahkan kehidupan mereka baik secara sosial maupun ekonomi dan juga meningkatkan peran aktif penduduk setempat dalam mengelola sumber daya laut dan pesisir. Melalui *CTMPAS* telat terbangun banyak kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, LSM dan mitra lainnya sehingga diharapkan seluruh negara anggota dapat menerapkan kerangka kerja dan rencana aksi *CTMPAS* tersebut di masing-masing negara..[4]

Adapun salah satu aksi mengenai keberhasilan kerangka kerja dan rencana aksi yang dilakukan negara Filipina adalah Taman Nasional Ang Pulo. Pulau yang berada di sekitar wilayah Calatagan, Provinsi Batangas negara Filipina adalah pulau tak berhuni yang sebelumnya dikelilingi oleh banyak mangrove serta tumbuh-tumbuhan hijau yang subur, tetapi kian hari terlihat gundul disebabkan pembabatan mangrove secara berlebihan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti pembagunan dan untuk bahan bakar sehingga mengurangi hasil penangkapan nelayan akibat peisisir pulau yang rusak. Akibat kerugian tersebut, anggota masyarakat yang diwakili oleh salah satu tokoh masyarakat, Hannah Esquerra berupaya mengembalikan kesejahteraan kawasan

[4] http://kkji.kp3k.kkp.go.id. 2014. CTI-CFF Dorong Pengelolaan dan Perlindungan Kawasan Perairan dan Pesisir Secara Berkelanjutan. Diakses melalui http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/beritabaru/205-cti-cff-dorong-pengelolaan-dan-perlindungan-kawasan-perairan-dan-pesisir-secara-berkelanjutan pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 15.53 WIB

pulau agar dapat mempertahankan tempat tinggal habitat asli keanekaragaman ikan langka dan juga sebagai pelindung pantai dari ancaman bencana alam. Sehingga mereka mendatangi desa untuk membuat serangkaian rencana guna menetapkan kawasan tersebut sebagai wilayah konservasi dan membangun Taman Pelestarian Ang Pulo ditahun 2009 dengan melakukan penanaman kembali dan konservasi. Aksi tersebut pun mengalami peningkatan dan mampu mengembalikan kembali fungsi hutan mangrove seperti dahulu. Kemudian bekerja sama dengan pemerintah kota dan *Conservation Internasional* (CI) dibantu *Coral Triangle Support Partnership (CTSP),* dilakukan rehabilitasi hutan mangrove dengan membangun jembatan setapak mengelilingi pulau sebagai fasilitas bagi wisatawan dan mampu membuka mata pencaharian baru bagi masyarakat Calatagan seperti *tour guide,* jasa angkutan penyebrangan dan berbagai cendera mata bagi para wisatawan. Selain itu, jumlah penangkapan nelayan mengalami peningkatan, dengan banyaknya manfaat dan potensi yang dimiliki Taman Pelestarian tersebut maka masyarakat sangat menjaga dan melindungi kawasan itu. Kesuksesan Taman Pelestarian Ang Pulo menjadi dasar bagi kawasan-kawasan lain untuk melakukan hal sama, seperti dikota Calapan di Silangang Mindoro , kota San Juan dan Lobo di Batangas.[5] Adapun bagian dari upaya ekonomi antara lain :

[5] Burke,Lauretta. Kathleen Reytar. Mark Spalding. Allison Perry. *Menengok Kembali Karang yang Terancam di Segitiga Terumbu Karang. (*World Resources Institute : Washington DC, 2012), hlm 20

1. Membangun Ketahanan Pangan

Sekretariat *Regional Interim Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* telah berkomitmen meningkatkan peran koordinasi dan isu tentang ketahanan pangan dengan melakukan beberapa strategi guna mempercepat pencapaian sasaran program ketahanan pangan (*food security*). Adapun strategi yang dilakukan adalah membentuk *CTI-CFF Business Council*, diharapkan melalui pembentukan CTI-CFF *Business Council* ini dapat bekerjasama dan bekerjasama dengan Chambers of Commerce dimasing-masing negara termasuk dengan berbagai asosiasi maupun organisasi pengusaha di bidang perikanan. *Business Council* memiliki peran strategis untuk merangkul para pelaku usaha di bidang perikanan dengan menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan yang beriringan dengan paradigma "Ekonomi Biru" (*Blue Economy*). Pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dengan mengadopsi *blue economy* tidak hanya bicara tentang pemanfaatan aktivitas ekonomi saja melainkan dengan menekankan keberlanjutan untuk mengatasi ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat perubahan iklim dan pemanasan global.[6] Peran penting lainnya adalah dalam membantu memerangi kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai peraturan atau *Illegal Unreported Unregistered*

[6] http://infopublik.id.2012. CTI-CFF Gelar Pertemuan bahas Ketahanan Pangan. Diakses melalui http://infopublik.id/read/28960/cti-cff-gelar-pertemuan-bahas-ketahanan-pangan pada tanggal 28 Mei 2017 pukul 23.26 WIB.

(IUU) Fishing melalui berbagai program dan pendekatan dalam forum dan kegiatan internasional.[7]

Berbagai program dan pendekatan telah dijalankan oleh beberapa negara dalam rangka menyelesaikan persoalan yang menekan seperti menambah pasokan pangan yang kian hari tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan masyarakat yang mengalami pertumbuhan yang pesat dan berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Negara Timor Leste yang merupakan negara dengan latar belakang berasal daerah konflik masih terus berupaya membangun lembaga pemerintahan dan berupaya meningkatkan ekonomi guna memenuhi kebutuhan masyarakat dimana sekitar 70% masyarakat Timor Leste bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan sehingga sangat berkaitan dengan Sumber Daya Alam. Sama halnya seperti negara Filipina, pemerintah dan masyarakat Timor Leste bersama *Conservation International* bekerjasama dengan *Coral Triangle Support Partnership (CTSP)* berupaya untuk meningkatkan kebutuhan pangan serta menciptakan lapangan kerja yang baru terhadap penduduk yang permukim di wilayah pesisir dan berupaya mengurangi ancaman terhadap penangkapan ikan yang merusak dengan cara membangun industry budidaya perikanan berkelanjutan dan budidaya rumput laut. Budidaya rumput laut berupakan salah satu bukti nyata keberhasilan program yang dijalankan hingga saat ini khususnya di Pulau Atour.

---

[7] http://maritimnews.com. 2017. Berikut Peran Strategis CTI-CFF Untuk Ketahanan Pangan. Diakses melalui http://maritimnews.com/peran-strategis-cti-cff-koordinasikan-kegiatan-konservasi-kelautan-perikanan-berkelanjutan-dan-ketahanan-pangan/ pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 16.04 WIB.

Tetapi, hal tersebut masih mengalami kendala seperti belum adanya batasan zona kawasan budidaya dan penyebar luasan peraturan sehingga terjadi konflik dalam perebutan pemanfaatan Sumber Daya Alam karena lemahnya landasan hukum. Peran *Conservation Internasional* adalah sebagai penengah antar masyarakat petani dalam membangun industry budidaya tersebut serta memberi masukan kepada pemerintah setempat tentang Strategi Nasional Budidaya Perikanan serta peningkatan kemampuan lembaga dan penyusunan Undang-Undang dalam jangka panjang yang bertujuan penting untuk mencapai target seperti pemberantasan kemiskinan dan pemenuhan ketahanan pangan secara keseluruhan bagi masyarakat Timor Leste.[8]

2. Menciptakan Mata Pencaharian Untuk Masyarakat Yang Tinggal Diwilayah Pesisir

Banyaknya isu-isu yang bermunculan khususnya tentang eksploitasi Sumber Daya Alam di kawasan Segitiga Karang Dunia merupakan sebuah ancaman besar yang membuat keseimbangan konservasi dan kesejahteraan masyarakat pesisir perlu menjadi sorotan oleh negara anggota itu sendiri dan dimasukan kedalam agenda utama *Coral Triangle Initiative.* CTI-CFF dan negara anggota kemudian menyusun kerangka kerja dan rencana aksi *Coral Triangle Marine Protected Area System (CTMPAS)* untuk mengatasi permasalah tersebut. Tujuan dan visi pembentukan CTMPAS adalah membuka lapangan pekerjaan

[8] Burke,Lauretta. Kathleen Reytar. Mark Spalding. Allison Perry. *Menengok Kembali Karang yang Terancam di Segitiga Terumbu Karang. (*World Resources Institute : Washington DC, 2012), hlm 44

baru yang lebih efisien guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat serta mewadahi sumber bahan pangan berbasis perairan dan melestarikan terumbu karang dan keanekaragaman hayati, rencana aksi ini diharapkan mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi kedepannya.

Salah satu permasalah yang ada dikawasan Coral Triangle adalah pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, seperti yang terjadi di wilayah Pulau Culion, Provinsi Palawan, Filipina, wilayah tersebut dikelilingi oleh beraneka terumbu karang sehingga dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk seiirng dengan makin bertambahnya ketergantungan terhadap sumber daya alam pesisir dan tinginya ancaman yang muncul akibat penangkapan berlebih dan merusak yang mengakibatkan terumbu karang hancur dan rusak. Sehingga untuk mengatasinya, yayasan PATH di Filipina membentuk *Integrated Population and Coastal Resource Management* untuk memberikan solusi terhadap keterkaitan masyarakat, perekonomian dan linkungan dengan program melakukan perbaikan fasilitas KB (Keluarga Berencana), mencari lapangan pekerjaan *alterbative* tanpa perlu bergantung terhadap terumbu karang serta memperbaiki konservasi pesisir. Program ini dianggap berhasil dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat, ketahanan pangan, serta kondisi terumbu karang yang kian membaik di Pulau Culion. Dari data yang diambil pada tahun 2001 hingga 2007 membuktikan bahwa

presentase keluarga yang menggantungkan hidupnya terhadap terumbu karang dan penangkapan ikan mulai berkurang khusunya dengan cara merusak karang.[9]

[9] Burke,Lauretta. Kathleen Reytar. Mark Spalding. Allison Perry. *Menengok Kembali Karang yang Terancam di Segitiga Terumbu Karang. (*World Resources Institute : Washington DC, 2012), hlm 49